

## **PSIKOLOGI DI AUSTRALIA**

*Sutarimah Ampuni*

### **PENGANTAR**

Pada tahun-tahun belakangan ini Psikologi di Indonesia tampaknya banyak berbenah diri. Berbagai perubahan dalam peraturan profesi psikologi menandai pembenahan diri tersebut. Dalam hal pendidikan tinggi Psikologi misalnya, Kolokium Psikologi X di Baturaden tanggal 11-12 April 2003 (HIMPSI, 2003b) menyetujui bahwa program pendidikan profesi seperti yang saat ini dijalankan akan segera berubah bentuk pada dua tahun ke depan. Mulai 2004 Program Magister Psikologi Profesional, yang meliputi empat semester kuliah dan praktek setelah S1, akan menggantikan program profesi. Padahal kalau kita lihat kembali ke belakang, program profesi sebenarnya masih relatif baru, yaitu merupakan pengejawantahan kurikulum nasional Psikologi tahun 1989 yang pelaksanaannya baru dimulai sekitar tahun 1995. Bahkan ada beberapa universitas yang baru mulai menawarkan program profesi 1-2 tahun belakangan ini (HIMPSI, 2003a).

Di samping bidang pendidikan, beberapa hal lain juga mengalami perubahan. Misalnya dalam hal pengakuan profesi psikolog, pengakuan atau gelar psikolog yang sebelumnya diberikan oleh universitas bersamaan dengan kelulusan dari program profesi, dalam Kolokium X disepakati bahwa selanjutnya pengakuan atau sertifikasi psikolog akan diberikan oleh HIMPSI Pusat (HIMPSI, 2003b).

Evaluasi dan pembaruan-pembaruan di tubuh profesi psikologi seperti yang dicontohkan di atas memang sangat diperlukan agar psikologi di Indonesia semakin tertata dan memiliki posisi yang mantap baik sebagai profesi maupun sebagai bidang ilmu. Untuk itu, Psikologi Indonesia di samping harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat juga perlu menengok negara lain, melihat sistem psikologi di luar Indonesia sebagai bahan perbandingan. Tulisan ini menggambarkan secara singkat perpsikologian Australia, dimaksudkan agar dapat menjadi salah satu bahan belajar dalam rangka evaluasi dan pembaruan di atas. Beberapa hal yang akan diuraikan adalah mengenai kelembagaan psikologi, sistem pendidikan-pelatihan dan riset, profil lulusan psikologi, serta hubungan psikologi dan publik. Dalam beberapa bagian, di samping mendeskripsikan sistem di Australia

penulis juga berusaha untuk memperbandingkan dengan sistem yang berlaku di Indonesia agar pembaca langsung memperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaannya. Di bagian terakhir penulis mengusulkan beberapa hal yang dapat dicontoh atau diadaptasi, atau menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan Psikologi di Indonesia.

## SEKILAS SEJARAH

Saat ini umur psikologi Australia adalah sekitar dua kali lipat umur psikologi Indonesia. Psikologi sebagai disiplin ilmu masuk ke Indonesia pada jaman kemerdekaan. Situs web Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (Universitas Indonesia, 2003) memaparkan bahwa pendidikan psikologi di Indonesia dimulai sejak tahun 1951 dengan didirikannya Balai Psychotechnik oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang tujuannya untuk membantu Kementerian P. P. dan K. saat itu dalam mencapai efisiensi di bidang pendidikan dan pengajaran, antara lain dengan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelajar-pelajar yang akan melanjutkan pendidikan kejuruan baik ke luar maupun di dalam negeri, dan menyelenggarakan pemeriksaan psikologis di perusahaan untuk menyeleksi calon pegawainya. Balai ini merupakan cikal bakal Fakultas Psikologi UI, yang merupakan institusi pendidikan Psikologi tertua di Indonesia. Organisasi profesi psikologi yaitu ISPSI (Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia) lahir di Jakarta tahun 1959. Tahun 1998 ISPSI berubah menjadi HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) mengikuti perkembangan kurikulum pendidikan pada waktu itu.

Di Australia, Psikologi masuk pada akhir abad ke-19, melalui ilmu yang sebelumnya telah dipelajari di sana yaitu filsafat dan kependidikan, dan juga kedokteran. Pada tahun 70-an Psikologi sebagai disiplin ilmu telah sangat populer di Australia sehingga semua (17) universitas di sana mengajarkan Psikologi (O'Neil, 1977).

Sejak tahun 1945 para psikolog Australia bergabung dalam wadah *British Psychological Society* cabang Australia. Baru pada tahun 1966 organisasi tersebut berubah menjadi wadah yang mandiri yaitu *Australian Psychological Society* (APS) (O'Neil, 1977).

## KELEMBAGAAN PSIKOLOGI DI AUSTRALIA

Saat ini di Australia dikenal dua lembaga utama yang berhubungan dengan profesi psikologi yaitu Masyarakat Psikologi Australia atau *Australian Psychological*

*Society* (APS) dan Dewan Registrasi Psikolog atau *Psychologists Registration Board* (selanjutnya akan disebut Dewan Registrasi saja). APS merupakan organisasi profesi sebagaimana HIMPSI, yang mewadahi para profesional dalam bidang psikologi. Dewan Registrasi adalah lembaga yang secara hukum mempunyai wewenang atas registrasi dan deregistrasi psikolog.

Struktur organisasi kedua lembaga tersebut sangat berbeda. APS merupakan organisasi nasional dengan cabang-cabang di setiap Negara bagian atau wilayah yang merupakan subordinat pusat. Dewan Registrasi dikembangkan secara terpisah di masing-masing negara bagian atau wilayah berdasarkan dasar hukum yang ditetapkan di negara bagian atau wilayah tersebut. Antar Dewan Registrasi tidak ada hubungan organisasional. Usia Dewan Registrasi bervariasi; Negara bagian Victoria misalnya, sudah membentuk badan ini pada tahun 1965 berdasarkan Undang-undang Praktek Psikologi (*Psychological Practices Act*) Victoria tahun 1965, sedangkan beberapa Negara bagian lain baru mempunyai Dewan Registrasi pada tahun 90-an (Knowles, 2003). Lebih lanjut mengenai kedua lembaga di atas diuraikan di bawah ini.

### ***Australian Psychological Society (APS)***

APS merupakan organisasi profesi yang keanggotaannya berdasar kesukarelaan sebagaimana HIMPSI. Misinya adalah “to represent, promote, and advance psychology and psychologists within the context of community well-being and scientific knowledge”. Misi ini menyiratkan bahwa APS berkomitmen untuk mengembangkan psikologi baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai profesi (Australian Psychological Society, 2003). Saat ini APS beranggotakan lebih dari 13.000 psikolog di seluruh Australia (APS, 2003), sekitar dua kali anggota HIMPSI yang berjumlah 7000-an (HIMPSI, 2003a).

Di halaman depan situsnya, APS menyatakan bahwa mereka berusaha untuk meningkatkan kualitas praktek psikologi dan mendorong pertumbuhan dan pembelajaran dengan cara menerapkan standar yang tinggi terhadap etika profesi dan pendidikan profesi (APS, 2003).

Dalam hal etika profesi, sama halnya dengan HIMPSI dan organisasi-organisasi profesi lainnya, APS bekerja dengan mengembangkan kode etik (*Code of Ethics*). Kode etik tersebut ditinjau ulang setiap dua tahun. Kode etik terbaru (2002a) berisikan Prinsip-prinsip Dasar (*General Principles*) dan aturan-aturan dasar mengenai delapan bidang: prosedur asesmen psikologis, hubungan dengan klien, pengajaran psikologi, supervisi dan *training*, riset, pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian, pernyataan

publik dan periklanan/promosi jasa, dan hubungan antara anggota dengan profesional-profesional lain (APS, 2002b).

Sebagaimana Kode Etik Psikologi Indonesia yang dilengkapi dengan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik (Himpsti, 2000), kode etik mereka juga dilengkapi panduan untuk membantu anggota dalam menginterpretasikan dan menerapkan kode etik dalam praktek profesional mereka. Panduan tersebut dinamakan *Ethical Guidelines*. Bedanya, jika pedoman kita merupakan penjelasan dari pasal-pasal Kode Etik seperti halnya Penjelasan UUD 45 menjelaskan Batang Tubuh, *Ethical Guidelines* tidak menjelaskan pasal-pasal kode etik melainkan menjabarkan secara detil aturan-aturan mengenai hal-hal khusus yang berhubungan dengan praktek psikologi. *Guidelines* terbaru (APS, 2002b) berisikan 14 panduan khusus, sebagai contoh adalah panduan mengenai kerahasiaan, penggunaan tes-tes psikologis, praktek terhadap klien-klien homoseksual dan biseksual, penggunaan prosedur aversif, dan penanganan klien dengan kecenderungan bunuh diri.

APS memiliki Komisi Etik yang bertugas menangani pengaduan masyarakat terhadap anggota. Namun demikian APS hanya berwenang melakukan investigasi dan pencabutan dari keanggotaan, tidak berwenang mencabut ijin praktek anggota yang melakukan kesalahan. Hasil investigasi APS diserahkan kepada Dewan Registrasi dan Dewan Registrasi lah yang berhak memberi sanksi hukum terhadap anggota tersebut.

Dalam hal pendidikan profesi, APS merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas akreditasi pendidikan psikologi di Australia. Sejak saat terbentuknya tahun 1966, APS menerapkan standar bahwa pendidikan minimal psikolog meliputi empat tahun pendidikan psikologi, yang terdiri dari tiga tahun pendidikan setara Sarjana S1 (*undergraduate*) dan setahun Pendidikan Tahun Ke-empat (*Forth Year*).

Psikolog yang menjadi anggota APS atau memenuhi syarat untuk menjadi anggota APS pada umumnya dipandang sebagai lebih kompeten atau *qualified* daripada mereka yang tidak. Saat ini, untuk menunjukkan keanggotaan APS, seorang psikolog berhak mencantumkan titel MAPS (*Member of the APS*) di belakang namanya. Sejak tahun 2000 APS menetapkan bahwa yang dapat menjadi anggota penuh APS dan mencantumkan gelar MAPS adalah mereka yang berpendidikan minimal S2, sedangkan mereka dengan pendidikan tahun ke-empat hanya dapat menjadi *Associate Member of the APS (Assoc/MAPS)* yaitu semacam anggota muda (APS, 2003).

Sejak 1970-an APS juga menerapkan panduan akreditasi untuk menentukan program-program pendidikan tinggi psikologi mana yang lulusannya *eligible* atau memenuhi syarat atas keanggotaan dalam APS. Lulusan program pendidikan psikologi

yang tidak terakreditasi oleh APS tidak berhak menjadi anggota APS (APS, 2003). Program pendidikan psikologi biasanya bekerja keras untuk mencapai dan mempertahankan status terakreditasi karena status itulah daya tarik mereka untuk mendapatkan mahasiswa.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa di Australia organisasi profesi psikologi yaitu APS memiliki posisi tawar yang tinggi. APS merupakan badan yang menentukan akreditasi institusi pendidikan psikologi. *Eligibility* atau memenuhi syarat atau tidaknya seseorang atas keanggotaan APS dilihat sebagai standar penilaian terhadap kualifikasi seorang psikolog. Ini menyiratkan bahwa seorang psikolog yang menjadi anggota APS atau memenuhi syarat untuk menjadi anggota APS dipandang lebih *qualified* daripada psikolog yang bukan anggota APS atau dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota APS.

### ***Psychologists Registration Board***

*Psychologists Registration Board* atau Dewan Registrasi adalah badan yang dibentuk oleh hukum untuk mengatur profesi psikologi. Praktisi psikologi harus terdaftar pada Dewan Registrasi. Adalah melanggar hukum jika seseorang menyebut dirinya sebagai psikolog dan melakukan praktek psikologi jika tidak terdaftar pada Dewan Registrasi, sekalipun ia telah memenuhi kualifikasi sebagai psikolog. Dewan Registrasi juga merupakan badan yang secara hukum berhak memberi penalti (termasuk pencabutan ijin praktek) jika psikolog melakukan pelanggaran kode etik.

Seperti telah disinggung di atas, setiap negara bagian mempunyai Dewan Registrasinya sendiri-sendiri, dan Dewan di setiap negara bagian memiliki kebijakannya masing-masing. Negara bagian Victoria mempunyai Dewan Registrasi yang paling mapan karena sudah ada sejak 1965. Pada situs webnya dapat dibaca bahwa tujuan mereka adalah untuk melindungi masyarakat dalam kaitannya dengan praktek psikologi dengan cara antara lain: meningkatkan standar praktek profesional, menetapkan standar-standar registrasi, dan menindaklanjuti pengaduan terhadap psikolog (*Psychological Registration Board of Victoria*, 2003).

Sebagaimana diatur dalam *Psychological Registration Act of Victoria* (*Psychological Registration Board of Victoria*, 2003a), Dewan Registrasi Victoria beranggotakan 9 orang yang diangkat oleh Gubernur. Di antara 9 orang itu, 6 orang harus merupakan psikolog yang terdaftar, 1 orang merupakan ahli hukum (*lawyer*), dan 2 orang anggota masyarakat yang bukan psikolog. Para anggota Dewan digaji bukan oleh masyarakat psikologi melainkan oleh pemerintah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi di Australia mengenal dua lembaga, yaitu APS dan Dewan Registrasi. APS merupakan organisasi profesi seperti halnya HIMPSI, yang mewadahi para profesional psikologi. Bedanya, di HIMPSI setiap lulusan S1 psikologi bisa bergabung menjadi anggota, sedangkan di Australia lulusan *undergraduate plus fourth year* psikologi saja baru dapat menjadi anggota muda, dan untuk menjadi anggota penuh syaratnya adalah pendidikan Master. APS memiliki posisi tawar yang tinggi, keanggotaan APS menyiratkan bahwa seorang psikolog lebih *qualified* daripada psikolog yang bukan anggota. APS bekerja dalam pengaturan etika profesi dan pendidikan profesi. Di sisi lain, Dewan Registrasi merupakan badan milik pemerintah yang secara hukum berhak memberi dan mencabut status hukum sebagai psikolog, atau dengan kata lain ijin praktek psikologi.

## **PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN**

Psikologi di Australia menganut apa yang dinamakan *scientist-practitioner model*. Dalam model ini, pendidikan Psikologi memberi penekanan yang seimbang pada riset ilmiah dan keterampilan praktis. Implikasi praktisnya, praktisi harus selalu membuka diri terhadap hasil-hasil penelitian mutakhir, dan sebaliknya, akademisi harus selalu melibatkan diri dengan praktek profesional sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan adalah mengenai masalah-masalah riil yang bersumber dari praktek profesi. Kode etik APS (APS, 2002a) dalam seksi *Competence* menegaskan bahwa anggota harus “*bring and maintain appropriate skills and learning in their areas of professional practice*”. Anggota bukan saja harus memiliki keterampilan yang tepat, tetapi juga harus selalu memantapkan keterampilannya tersebut, dan ini berarti bahwa mereka harus selalu mengikuti perkembangan dalam bidang Psikologi untuk menjaga agar kompetensi mereka *up to date*.

Bagian berikut ini menguraikan pendidikan formal psikologi Australia pada tataran *undergraduate* dan *fourth year*, spesialisasi, dan sedikit mengenai penelitian psikologi.

### ***Pendidikan Formal Psikologi***

Seperti yang telah dikemukakan, sejak awal terbentuknya APS telah menetapkan bahwa standar minimal untuk menjadi anggota adalah pendidikan psikologi selama empat tahun berturut-turut, meliputi tiga tahun *undergraduate* dan setahun Pendidikan Tahun Ke-empat (*Fourth Year*). Persyaratan tersebut belum berubah hingga saat ini (catatan: saat ini Dewan Registrasi di beberapa negara bagian mulai mempertimbang-

kan perlunya meningkatkan kualifikasi minimal psikolog ke jenjang S2 atau Master (Knowles, 2003)).

### ***Pendidikan setingkat Sarjana Strata 1 (undergraduate)***

Di tingkat *undergraduate*, psikologi ditawarkan dalam dua bentuk: *degree* murni psikologi atau kombinasi (*combined degree*). Dalam program *combined degree* Psikologi biasanya dipelajari bersamaan dengan *Arts* atau *Sciences*. Mahasiswa diharuskan untuk mengambil 10-12 matakuliah Psikologi di samping matakuliah-matakuliah lain dalam bidang kombinasinya. *Degree* murni psikologi menyerupai pendidikan S1 Psikologi Indonesia di mana mahasiswa menjalani 100% kurikulum Psikologi.

Menurut Lovibond (1977), karakteristik pendidikan S1 Psikologi di Australia berada di tengah-tengah antara karakteristik sistem Amerika dan Inggris. Program-program S1 Psikologi Australia menyerupai Amerika dalam hal mereka menawarkan materi yang meluas dan bersifat umum, namun juga menyerupai Inggris dalam hal mereka berusaha melayani mahasiswa yang bermaksud serius mendalami suatu bidang tertentu.

Membandingkan desain pendidikan S1 Psikologi di Australia dan di Indonesia, penulis mendapati perbedaan yang cukup mencolok<sup>1</sup>. Dilihat dari jumlah matakuliahnya saja misalnya, untuk menyelesaikan S1 di Australia selama tiga tahun seseorang menyelesaikan sekitar 24 matakuliah, termasuk pilihan. Semua matakuliah tersebut adalah matakuliah keahlian. Sedangkan penulis, selama 4 tahun kuliah S1, menyelesaikan hampir tiga kali lipatnyanya, yaitu 65 matakuliah termasuk Kuliah Kerja Nyata dan Skripsi. Lebih dari 10%-nya merupakan matakuliah umum seperti filsafat dan bahasa<sup>2</sup>.

Dilihat sepintas, kurikulum mereka tampak lebih sederhana dan mendasar. Secara global dapat dilihat bahwa materi yang diberikan di S1 adalah yang bersifat dasar, seperti Psikologi Umum, dasar-dasar psikologi klinis dan *neuropsychology*, dasar-dasar psikologi sosial kognitif, dasar-dasar perkembangan, serta metodologi. Kalaulpun ada matakuliah yang bersifat khusus, biasanya merupakan pilihan yang

---

<sup>1</sup> Penulis mendasarkan analisis ini pada empat Universitas terkemuka yaitu Melbourne University, Monash University dan Swinburne University of Technology (SUT) di Melbourne, serta University of New South Wales (UNSW) di Sydney.

<sup>2</sup> Perbandingan ini mungkin tidak relevan dengan kurikulum Psikologi Indonesia yang berlaku saat ini, namun secara umum dapat dilihat pola yang sama bahwa pada pendidikan S1 Psikologi di Australia terdapat lebih sedikit matakuliah dan semuanya merupakan matakuliah keahlian.

diperuntukkan bagi mahasiswa tahun ketiga. Contohnya adalah matakuliah Psikologi Lingkungan di Melbourne University, Psikologi Industri/Organisasi di Melbourne University dan Monash University, atau Psikologi Konseling di Swinburne University of Technology.

Menarik lagi adalah mengenai pengukuran psikologi atau psikotes. Di Indonesia, berbagai macam pengukuran atau tes psikologi telah diajarkan secara intensif di level S1 melalui matakuliah-matakuliah Psikodiagnostika, sedangkan di Australia mahasiswa S1 tidak mempelajari tes-tes psikologi secara mendalam<sup>3</sup>. Asesmen psikologis tampaknya bukan merupakan fokus kurikulum, dilihat dari fakta bahwa berbagai universitas hanya menyediakan satu matakuliah asesmen dalam tiga tahun masa pendidikan sarjana. Satu matakuliah itupun tidak eksklusif asesmen; matakuliah asesmen digabung dalam satu matakuliah dengan etika di Monash dan dengan kepribadian di UNSW. Di Melbourne University bahkan tidak ada matakuliah asesmen di tingkat S1.

Dari struktur kuliahnya, dapat dilihat bahwa secara umum program pendidikan S1 psikologi di Australia lebih menekankan pada dasar-dasar ilmiah psikologi sebagai suatu ilmu (*science*). Metodologi penelitian (kuantitatif) mendapat penekanan utama. Di setiap universitas, metodologi riset diajarkan paling tidak dalam dua matakuliah wajib. Cakupan matakuliah-matakuliah metodologi ini sangat luas, meliputi desain penelitian, eksperimen, statistik, dan analisis data atau *computing*.

Meskipun menekankan pada metode penelitian dan pengukuran, S1 Psikologi di Australia tidak mempersyaratkan skripsi atau tesis. Riset setara skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bukan pada level S1, melainkan pada Tahun Ke-empat. Namun demikian, penelitian tidaklah asing bagi mahasiswa S1 karena dalam berbagai matakuliah (terutama matakuliah riset) mereka sudah ditugaskan untuk melakukan proyek-proyek penelitian.

### ***Pendidikan Tahun Ke-empat (Fourth Year)***

Jenjang Tahun Ke-empat biasa dikenal juga dengan *Honours year*. Lulusan program ini berhak atas gelar *Honours degree*, misalnya yang awalnya *Bachelor of Arts* (BA) akan menjadi *BA(Hon)* dan *Bachelor of Psychology* akan menjadi

---

<sup>3</sup> Seorang teman kuliah penulis mengatakan bahwa di S1 dia hanya 'menonton' alat tes WAIS yang diperagakan oleh dosennya, memegang pun tidak. Teman lain mengatakan bahwa dia baru mengenal tes WAIS saat kuliah di level *Fourth Year*.



*BPsych(Hon)*. Beberapa universitas menyelenggarakannya sebagai program *Graduate Diploma of Psychology*, yang lulusannya mendapat gelar *GradDipPsych*.

Lovibond (1977) mencatat bahwa pada tahun 1970-an sekitar 25% dari mahasiswa yang menyelesaikan *undergraduate* psikologi meneruskan ke jenjang *Fourth Year*. Hingga tahun-tahun terakhir ini proporsi lulusan S1 yang meneruskan ke *Fourth Year* tersebut tetap masih sekitar 25% (Komunikasi pribadi dengan Ann Knowles, Mei 2003). Tempat yang tersedia untuk jenjang *Fourth Year* ini sangat terbatas, sehingga hanya lulusan S1 yang berprestasi bagus bisa terseleksi dan akhirnya bisa meniti karir sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi profesional.

Jenjang Tahun Ke-empat atau *Fourth Year* ini, meskipun secara sepiantas tampaknya setara dengan Program Profesi di Indonesia, ternyata materinya berbeda dengan Program Profesi. Jika di Indonesia program profesi, sesuai namanya, merupakan pendidikan dan pelatihan psikologi praktis, di Australia pelatihan praktis tersebut hanya merupakan bagian kecilnya. Materi utamanya adalah proyek penelitian, yang menurut pengamatan penulis bisa disetarakan dengan skripsi. Mahasiswa tahun ke-empat masih mengikuti kuliah yang secara umum isinya adalah metode penelitian (pada umumnya kuantitatif) lanjut, asesmen psikologi, etika profesi, dan seminar mengenai topik-topik mutakhir dalam psikologi. Metodologi, pengukuran, dan pengolahan data masih menjadi penekanan. Asesmen psikologi tetap belum diajarkan secara spesifik juga di jenjang ini. Etika profesi secara spesifik baru diberikan pada jenjang ini dan bukan pada jenjang S1.

Kerja praktek bukan bagian penting dari program pendidikan ini. Hanya sebagian kecil universitas mengadakan matakuliah kerja praktek bagi mahasiswa tahun keempatnya (Monash University misalnya), dan itu biasanya merupakan matakuliah pilihan yang boleh diikuti atau tidak. Kerja praktek (*job placement*) intensif biasanya baru diselenggarakan pada jenjang S2 atau Master.

Berbeda dengan di Indonesia, di Australia seorang lulusan Tahun Ke-empat tidak langsung mendapat sebutan “psikolog”. Mereka mendapat hak untuk mendapat sebutan Psikolog, namun untuk itu mereka harus mendaftarkan diri ke Dewan Registrasi. Dewan Registrasi akan mempertimbangkan, kemudian jika dianggap memenuhi syarat, mereka akan ditetapkan sebagai Psikolog Masa Percobaan (*probationary psychologist*). Dalam masa ini seorang *probationary psychologist* memperoleh ijin untuk berpraktek secara terbatas di bawah supervisi seorang psikolog yang berkualifikasi (*qualified*), paling tidak selama dua tahun. Setelah itu dia dapat mendaftarkan diri untuk mendapat status sebagai “Psikolog” penuh.

Saat ini di Australia ada 38 universitas yang menyediakan program psikologi yang terakreditasi, baik *undergraduate* maupun *postgraduate*. (jumlah yang hampir sama dengan di Indonesia, yaitu 40). APS hingga saat ini merupakan badan yang hampir bertanggungjawab penuh atas proses akreditasi tersebut, meskipun dalam jangka waktu ke depan Dewan Registrasi mungkin juga akan dilibatkan (APS, 2003). Status akreditasi sebuah program psikologi dipandang sangat penting karena status tersebut akan menentukan keputusan Dewan Registrasi untuk memberi ijin praktek (registrasi) atau tidak, bagi lulusannya.

### ***Spesialisasi***

Hanya di Negara bagian Western Australia diakui adanya titel spesialis, sedangkan di Negara bagian yang lain spesialisasi tidak ditunjukkan dengan titel. Spesialisasi ditunjukkan dengan menjadi anggota badan yang dinamakan *college*. College adalah bagian dari APS yang mewadahi para psikolog dengan spesialisasi yang sama. Saat ini ada sembilan *colleges*: *Clinical, Clinical Neuropsychology, Community, Counselling, Educational and Developmental, Forensic, Health, Organisational, dan Sport Psychology* (Knowles, 2003; APS, 2003).

Untuk menjadi anggota dari *colleges* di atas persyaratannya tentu lebih berat dibanding untuk menjadi anggota APS. Sebagai contoh, untuk menjadi anggota *College of Counselling Psychology* seorang psikolog paling tidak harus menyelesaikan *Masters* dalam bidang konseling dan dua tahun praktek tersupervisi.

Begitu terdaftar sebagai anggota suatu *college*, seorang psikolog juga harus berjuang untuk mempertahankan keanggotaan tersebut melalui *professional development* (PD). PD ini merupakan suatu program yang bersiklus dua tahunan. Selama masa dua tahun, anggota diharuskan untuk mengumpulkan poin kredit dalam jumlah tertentu untuk dapat meneruskan keanggotannya dalam suatu *college*. Poin PD ini bisa diperoleh dari berbagai kegiatan pengembangan seperti seminar, konferensi, pelatihan, *workshop*, yang aturan pembobotan poinnya telah ditentukan oleh *colleges* tersebut (Knowles, 2003; APS, 2003).

### ***Penelitian Psikologi***

APS mempunyai dua divisi, yaitu the *Division of Independently Practising Psychologists* (DIPP) yang mengurus psikolog yang melakukan jasa praktek, dan *Division of Research and Teaching* (DRAT) yang menangani pengembangan disiplin psikologi melalui pengembangan penelitian dan pengajaran.

Knowles (2003) mengutip laporan dari *Australian Research Council* (ARC) menuliskan bahwa psikologi di Australia mempunyai sumbangan sejumlah 2,5% terhadap penelitian psikologi di dunia, dan 2,8% tulisan atau artikel di jurnal ilmiah dunia. Berdasarkan rekomendasi ARC, penelitian psikologi di Australia saat ini diprioritaskan dalam bidang-bidang berikut: *human factors* dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan perubahan teknologi, psikologi klinis dengan penekanan pada psikologi kesehatan, psikologi industri dan organisasi, dan psikologi faal dan *neuroscience*. ARC juga merekomendasikan agar psikologi membangun strategi untuk meningkatkan komunikasi antara disiplin ilmu dan profesi psikologi untuk memperkuat dasar ilmiah bagi praktek profesional dan pemahaman penelitian bagi praktisi psikologi.

### **Profil Lulusan Psikologi**

Lulusan psikologi yang menyelesaikan studinya hingga jenjang *Fourth Year* selanjutnya melalui masa percobaan dapat menjalani profesi sebagai psikolog. Bagi mereka dalam golongan ini, bidang konseling dan klinis tampaknya merupakan primadona. Di Negara bagian New South Wales pada tahun 1998 (UNSW, 2003) didapati bahwa 28,7% psikolog bekerja dalam bidang konseling, dan 20,1% dalam bidang klinis. Bidang terpopuler ketiga adalah bidang perkembangan dan pendidikan (15,8%). Sebanyak 7,8% psikolog bekerja dalam bidang organisasi. Sisanya, pada bidang-bidang kesehatan, pendidikan, penelitian dan komunitas masing-masing sekitar 5%, dan masing-masing sekitar 3% pada bidang *neuropsychology* dan *sports*.

Bagaimana dengan mereka yang hanya berhenti pada jenjang S1 saja? Penulis tidak menemukan data empirik mengenai distribusi lulusan *undergraduate* Psikologi ke lapangan pekerjaan, namun demikian situs web departemen Psikologi UNSW menyediakan *link* yang menjelaskan berbagai pilihan karir yang dapat dijalani oleh golongan ini. Pilihan-pilihan profesi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

| Tabel 1. Berbagai pilihan profesi yang dapat dijalani oleh lulusan S1 Psikologi yang tidak menyelesaikan jenjang <i>Fourth Year</i>   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Advertising Specialist</i></li> <li>▪ <i>Community Corrections Officer</i></li> <li>▪ <i>Community Development Officer</i></li> <li>▪ <i>Community Relations Officer</i></li> <li>▪ <i>Community Worker</i></li> <li>▪ <i>Copyrightier</i></li> <li>▪ <i>Counsellor (may need other registration qualifications)</i></li> <li>▪ <i>Developmental Care Worker</i></li> <li>▪ <i>Health Promotion Officer</i></li> <li>▪ <i>Human Resources Officer</i></li> <li>▪ <i>Industrial Relations Officer</i></li> <li>▪ <i>Journalist</i></li> <li>▪ <i>Management Consultant</i></li> <li>▪ <i>Market Research Analyst</i></li> <li>▪ <i>Market Research Interviewer</i></li> <li>▪ <i>Marketing Officer</i></li> <li>▪ <i>Occupational Health and Safety Officer</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Public Relations/Affairs Officer</i></li> <li>▪ <i>Recruitment Officer</i></li> <li>▪ <i>Retail Sales Manager</i></li> <li>▪ <i>Training and Development Officer</i></li> <li>▪ <i>Welfare Worker</i></li> <li>▪ <i>Writer</i></li> <li>▪ <i>Youth Worker</i></li> <li>▪ <i>Careers Counsellor</i></li> <li>▪ <i>Child Welfare Case Worker</i></li> <li>▪ <i>EEO Representative</i></li> <li>▪ <i>Management Analyst</i></li> <li>▪ <i>Out-placement Specialist</i></li> <li>▪ <i>Public Health Administrator</i></li> <li>▪ <i>Public Health Investigator</i></li> <li>▪ <i>Research Assistant</i></li> <li>▪ <i>Social Researcher</i></li> <li>▪ <i>Social Scientist</i></li> <li>▪ <i>Social and Human Service Assistant</i></li> </ul> |

Sumber: UNSW, 2003.

Sebuah studi yang dilakukan pada 107 lulusan *Fourth Year* Melbourne University pada tahun 1985 (Knowles, 2003) mengindikasikan bahwa kebanyakan mahasiswa merencanakan untuk menekuni bidang klinis atau konseling pada saat memasuki universitas, namun kemudian mereka berubah minat dan mendapatkan pekerjaan dalam bidang bisnis, industri atau administrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini Knowles (2003) menyimpulkan bahwa pendidikan S1 psikologi memang seharusnya tetap berorientasi meluas untuk memberi wawasan psikologi yang bersifat umum, sedangkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya menuju ke spesialisasi belum perlu diberikan dalam jenjang S1.

### **Psikologi dan Masyarakat**

Bukan hanya di negara kita saja orang tidak tahu bedanya psikologi dan psikiatri. Penelitian Kirkland (Knowles, 2003) mendapati bahwa kebanyakan orang di Australia tidak mengerti perbedaan antara psikolog dan psikiater. Namun demikian, jika di negara kita usaha yang dilakukan psikologi untuk “memperkenalkan diri” ke

masyarakat masih sangat minim, di Australia usaha-usaha sudah dilakukan dengan lebih agresif. Di halaman depan situs APS misalnya, dapat kita baca satu bagian khusus yang membahas psikologi dan psikiatri. APS dan Dewan Registrasi juga menerbitkan brosur-brosur yang disebarluaskan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan diri.

Menurut Knowles (2003), di Australia selama 40 tahun terakhir ini telah terjadi pergeseran sikap dan harapan publik dalam berhubungan dengan profesi. Jika dulu publik atau klien merupakan pihak yang bergantung kepada profesi, kini publik semakin menuntut akan kesetaraan hak dalam hubungan klien-profesi.

Tak mengherankan jika Kode Etik Psikologi Australia (APS, 2002a) sangat menekankan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak klien. Sebagai contoh, dalam kode etik diatur dengan jelas bahwa klien berhak atas pelayanan dari psikolog yang kompeten, dengan standar kualitas pelayanan yang terbaik. Batas-batas profesional (*professional boundaries*) sangat dihargai sehingga seorang psikolog “diharamkan” untuk mempunyai hubungan lain dengan klien (misalnya hubungan persahabatan, bisnis, guru-murid, apalagi hubungan romatik atau seksual) di luar hubungan profesional antara psikolog dan klien. Catatan psikologis mengenai klien diperlakukan sebagai *health record* atau catatan kesehatan, yang sesuai dengan Undang-undang, klien mempunyai hak untuk mengaksesnya (dengan syarat tertentu).

Jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, Dewan Registrasi adalah badan yang berwenang menindaknya. Dewan Registrasi memiliki Komite Pengaduan, yang bertugas memproses pengaduan terhadap psikolog, baik yang disampaikan oleh masyarakat umum (termasuk klien) maupun masyarakat Psikologi sendiri (misalnya sesama psikolog). Jika sebuah pengaduan diterima, seorang petugas investigasi biasanya ditugaskan untuk mewawancarai pihak pengadu dan yang diadukan. Petugas ini kemudian melaporkan hasil investigasinya ke Komite Pengaduan. Komite kemudian mempelajari laporan tersebut dan menyampaikan rekomendasi ke Dewan. Dewan memutuskan apakah akan menutup atau melanjutkan investigasi terhadap kasus tersebut. Jika memang ada indikasi pelanggaran kode etik ataupun *misconduct*, Dewan melanjutkan investigasi ini ke tahap *informal hearing* atau *formal hearing*. *Informal hearing* dilakukan untuk menginvestigasi kasus yang cukup serius. *Informal hearing* ini bersifat tertutup bagi media, dan nama psikolog yang terlibat dirahasiakan. Hasil akhir dari *informal hearing* ini bisa berupa keputusan yang mengharuskan psikolog yang diadukan untuk menerima konseling, peringatan keras, atau pendidikan lebih lanjut. Seorang psikolog yang tidak puas terhadap hasil *informal hearing* dapat mengusulkan *formal hearing*.

*Formal hearing* ditujukan untuk menginvestigasi kasus yang lebih serius lagi. Forum ini terbuka untuk umum. Sebagaimana dalam proses persidangan, pihak psikolog maupun Dewan Registrasi biasanya diwakili oleh pengacara. Seorang psikolog yang terbukti telah melakukan perilaku tak profesional (*unprofessional misconduct*) dalam forum ini dapat menerima sanksi mulai yang teringan keharusan menjalani konseling hingga yang terberat deregistrasi atau pencabutan ijin praktek psikologi. Proses dan hasil *formal hearing* ini diumumkan kepada masyarakat luas melalui media-media komunikasi Dewan Registrasi, termasuk melalui situs web-nya, dan juga diumumkan melalui harian umum (misalnya *The Age* di Negara Bagian Victoria) (Psychologists Registration Board of Victoria, 2003b).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa profesi psikologi sangat menghargai dan memberi perlindungan terhadap hak-hak klien pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

## **PENUTUP**

Adalah wajar jika sistem Psikologi di Australia terlihat lebih mapan dan tertata, sebab di samping usianya yang dua kali lipat lebih tua dari Psikologi di Indonesia, mereka pun memiliki dukungan sumber daya ekonomi dan teknologi yang kuat. Bukan itu saja, mereka juga mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah.

Penulis mencatat beberapa hal utama yang cukup ideal untuk menjadi bahan belajar ataupun sumber inspirasi bagi pengembangan Psikologi di Indonesia. Pertama, dalam hal keorganisasian, APS memiliki posisi tawar yang tinggi di mana organisasi tersebut menentukan status akreditasi pendidikan tinggi psikologi, dan keanggotaan APS dipandang sangat penting karena mencerminkan kualifikasi seorang psikolog. Psikologi Indonesia tampaknya perlu lebih memberdayakan HIMPSI sehingga organisasi tersebut dapat lebih berperan dan diakui dalam mengatur perpsikologian kita.

Ke dua, dibandingkan dengan di Australia, pendidikan Psikologi dalam strata 1 dan profesi di Indonesia tampaknya jauh lebih “berbobot”, dalam artian beban yang harus dipenuhi. Melihat kenyataan bahwa waktu tempuh rata-rata S1 psikologi di UGM saat ini masih di atas 4 tahun, dan apalagi ditambah dengan pendidikan profesi –tentu lebih dari 5 tahun– penulis memandang perlunya mempertimbangkan kembali beban pendidikan psikologi kita. Perlu dipertanyakan juga relevansi pemberian matakuliah-matakuliah asesmen psikologi secara ekstensif dan intensif di tingkat S1,

sebab pada akhirnya lulusan S1 tidak diharapkan untuk mempraktekkan keahlian tersebut tanpa pendidikan lebih lanjut.

Ke tiga, pengakuan keahlian psikologi atau psikolog di Indonesia diberikan secara langsung bersamaan dengan kelulusan dari pendidikan profesi, dan saat itu pula seorang lulusan dapat mengurus ijin praktek sebagai psikolog. Di Australia, lulusan pendidikan tahun ke-empat harus berpraktek secara terbatas selama dua tahun sebagai *probationary psychologist* di bawah supervisi psikolog senior dulu untuk pada akhirnya dapat mengusulkan diri diakui sebagai psikolog penuh. Sistem ini menurut penulis lebih masuk akal dan cukup bagus untuk diadaptasi di Indonesia, mengingat bahwa lulusan program pendidikan profesi belumlah memiliki pengalaman yang memadai apalagi dalam berhadapan dengan klien secara langsung, dan untuk itu mereka seharusnya belum dilepaskan untuk berpraktek secara mandiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Australian Psychological Society. 2002a. *Code of ethics*. Melbourne: The Australian Psychological Society Limited.
- Australian Psychological Society. 2002b. *Ethical guidelines (4<sup>th</sup> edition)*. Melbourne: The Australian Psychological Society Limited.
- Australian Psychological Society. 2003. *The Australian Psychological Society Limited*. <http://www.psychsociety.com.au>, dibaca 01/10/03
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). 2000. *Kode Etik Psikologi Indonesia*. <http://www.himpsi.or.id/etik.htm>, dibaca 01/10/03.
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). 2003a. *Organisasi HIMPSI*. <http://www.himpsi.or.id/> dibaca 15/08/03.
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). 2003b. *Kolokium X. Lokakarya Nasional Pendidikan Psikologi di Indonesia*. <http://www.himpsi.or.id/> dibaca 15/08/03.
- Knowles, A. 2003. *HAY 543/643 Professional ethical and legal issues reading material*. Melbourne: School of Social and Behavioural Sciences, Swinburne University of Technology.
- Lovibond, S.H. 1977. Undergraduate teaching in psychology in Australian Universities. Dalam Nixon, M., & Taft, R. (editor). *Psychology in Australia*. Rushcutters Bay, NSW: Pergamon Press.
- Monash University. 2003. *Undergraduate handbook - Psychology*. <http://www.monash.edu/pubs/handbooks/undergrad/ug0371.htm>, dibaca 05/10/03.

- Monash University. 2003. *Postgraduate handbook – Postgraduate Diploma of Psychology*. <http://www.monash.edu/pubs/handbooks/postgrad/pg0674.htm>, dibaca 05/10/03.
- O’Neil, W.M. 1977. Teaching and practice of psychology in Australia in the first phases. Dalam Nixon, M. & Taft, R. (editor). *Psychology in Australia*. Rushcutters Bay, NSW: Pergamon Press.
- Psychologists Registration Board of Victoria. 2003a. *The Psychologists Registration Board of Victoria*. <http://www.psychreg.vic.gov.au>, dibaca 01/10/2003.
- Psychologists Registration Board of Victoria. 2003b. *Complaints Information*. <http://www.psychreg.vic.gov.au/content.php?page=10> dibaca pada 05/10/2003.
- Swinburne University of Technology. 2003. *Bachelor degrees in Arts and Social Sciences. N063 – Bachelor of Social Science (Psychology)*. <http://www.swin.edu.au/sbs>, dibaca 01/10/03.
- Swinburne University of Technology. 2003. *Bachelor degrees in Arts and Social Sciences. N052 – Bachelor of Arts (Honours)*. <http://www.swin.edu.au/sbs>, dibaca 01/10/03.
- The University of Melbourne. 2003. *Undergraduate Studies-Psychology*. <http://www.psych.unimelb.edu.au/courses/ugrad/index.html>, dibaca pada 05/10/03.
- The University of Melbourne. 2003. *Fourth Year Studies-Psychology*. <http://www.psych.unimelb.edu.au/courses/fourth/index.html>, dibaca pada 05/10/03.
- The University of New South Wales, 2003. *Undergraduate Studies booklet*. <http://www.psy.unsw.edu.au/study/undergrad/index.html> dibaca 01/10/03.
- The University of New South Wales, 2003. *Fourth Year Program in Psychology*. <http://www.psy.unsw.edu.au/study/undergrad/index.html> dibaca 01/10/03.
- The University of New South Wales, 2003. *Psychology courses and careers*. <http://www.psy.unsw.edu.au/study/careers/> dibaca 05/10/03.
- Universitas Indonesia, 2003. *Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sejarah*. <http://www.ui.ac.id/fpsi.htm> dibaca 08/10/03.